

**KEWENANGAN PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
DALAM MENENTUKAN UPAH LEMBUR DALAM HAL
TERJADI PERSELISIHAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Mochamad Indra Prayoga

NIM 135010107111149



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULAS HUKUM
MALANG
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **KEWENANGAN PEGAWAI
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
DALAM MENENTUKAN UPAH
LEMBUR DALAM HAL TERJADI
PERSELISIHAN**

Identitas Penulis :

a. Nama : **Mochamad Indra Prayoga**

b. NIM : **135010107111149**

c. Konsentrasi : **Hukum Perdata (Hukum Perburuhan)**

Jangka Waktu Penelitian : **4 Bulan**

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof.Dr.A.Rachmad Budiono.,SH.,M.Hum
NIP. 19591118 198601 1 002

Ratih Dheviana Puru HT, S.H.,LL.M
NIP. 19790728 200502 2 001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.
NIP. 19720622 200501 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

**KEWENANGAN PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DALAM
MENENTUKAN UPAH LEMBUR DALAM HAL TERJADI PERSELISIHAN**

Oleh:

**MOCHAMAD INDRA PRAYOGA
NIM. 135010107111149**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Majelis Penguji

Sekretaris Majelis

Prof.Dr.A.RachmadBudiono,SH.,M.Hum
NIP. 19591118 198601 1 002

Ratih Dheviana Puru HT,S.H.,LL.M
NIP. 19790728 200502 2 001

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Budi Santoso., SH.,LLM
NIP. 197206222005011002

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si.
NIP. 19620805198802 1 001

RINGKASAN

Mochamad Indra Prayoga, Hukum Perburuhan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2017, **KEWENANGAN PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DALAM MENENTUKAN UPAH LEMBUR DALAM HAL TERJADI PERSELISIHAN**, Pembimbing Utama: Dr. Prof.Dr.A.Rachmad Budiono.,SH.,M.Hum, Pembimbing Pendamping: Ratih Dheviana Puru HT, S.H., LL.M.

Berdasarkan latar belakang diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: Bagaimana kewenangan memutus dan menyelesaikan perselisihan tentang upah lembur berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perselisihan Hubungan Industrial dengan Keputusan menteri Nomor 102 Tahun 2004 Tentang Waktu kerja lembur dan upah kerja lembur?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan *Statue Approach* dan *Case Approach*. Analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui interpretasi, yakni interpretasi gramatikal dan interpretasi ekstensif.

Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas rumusan masalah yaitu mengenai kewenangan pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam menentukan upah lembur dalam hal terjadi perselisihan, dimana Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan pengadilan negeri yang berwenang mengadili, memeriksa dan memberikan putusan terhadap permasalahan perselisihan hubungan industrial, Dalam melakukan penyelesaian perselisihan hubungan indutrial tidak dikenal lembaga banding, karena dalam perselisihan ini hanya dikenal di lembaga kasasi.

SUMMARY

Mochamad Indra Prayoga, Labor Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, August 2017, AUTHORITY OF EMPLOYEES 'SUPERVISORY EMPLOYER IN DETERMINING HOSPITAL WEIGHTS IN DISPUTES, Supervisor: Dr. Prof.Dr.A.Rachmad Budiono., SH., M.Hum, Supervisor: Ratih Dheviana Puru HT, S.H., LL.M.

Based on the above background, this paper raises the formulation of the problem: How is the authority to decide and settle disputes over overtime wages based on Law No. 2 of 2004 on industrial relations disputes with Ministerial Decree Number 102 Year 2004 About Overtime and overtime working hours? This research uses normative juridical research by using approach of Statue Approach and Case Approach. Data analysis in this research is done through interpretation, namely grammatical interpretation and extensive interpretation.

From the result of the research, the writer got answer to the problem formulation that is concerning the authority of the labor inspector in determining overtime wages in case of dispute, where the Industrial Relations Court is a special court established in the court of state authorized to examine and give decision on industrial relations disputes , In the settlement of disputes relating indutrial unknown appeals agencies, because in this dispute only known in the cassation institution.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobilalamin, Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: “Kewenangan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dalam Menentukan Upah Lembur Dalam Hal Terjadi Perselisihan”. Skripsi ini diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, doa, serta bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. DR. Rachmad Syafa'at, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata atas segala dukungannya dalam proses pembuatan Skripsi ini;
3. Prof.Dr.A.Rachmad Budiono.,SH.,M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing Utama yang selalu memberikan saran dan kritikan yang membangun dalam penulisan Skripsi;
4. Ratih Dheviana Puru HT, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Pendamping dan juga Dosen Konsentrasi Hukum Perburuhan yang telah memberikan banyak sekali masukan, kritik, serta sarannya dalam penyelesaiannya skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan banyak sekali ilmu serta pengetahuannya kepada penulis sehingga kelak nanti penulis dapat gunakan untuk masa depan.
6. Ayah dan Ibu yang selalu membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini, baik materi maupun doanya untuk penulis;
7. Keluarga Besar Angkatan 2013 yang juga berjuang bersama dalam proses pembuatan skripsi ini.
8. Dan Pihak – pihak lain yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu – persatu.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis masih menyadari masih banyak kekurangan sehingga masukan serta kritik saran selalu diharapkan oleh penulis. Akhir kata, Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak dan memohon maaf atas segala kesalahan dalam proses skripsi ini.

Malang,2 Agustus 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Ringkasan	vi
<i>Summary</i>	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	8
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Sitematika Penulisan	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan.....	19
B. Subjek Hukum Dalam Perjanjian Kerja	28
C. Objek Hukum Dalam Hubungan Kerja.....	29
D. Syarat Perjanjian Kerja.....	29
E. Jenis Perjanjian Kerja.....	31
F..Pengawas Ketenagakerjaan	34
G. Kewenangan	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	38
B. Metode Pendekatan	38
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	39
D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum.....	40
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	41
F..Definisi Konseptual.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Kewenangan Memutus dan Menyelesaikan Perselisihan Upah Lembur Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan Hubungan Industrial	45
B. Kepmenakertrans Nomor 102 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur	62
C. Putusan Banding Nomor 223/B/2015/PT.TUN.JKT.....	63
D. Pengadilan Hubungan Industrial sebagai Pengadilan Khusus	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71